
BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi Bupati yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

A. GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, mulai 1 Januari 2012 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol dan Linnmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh kepala kantor dan beralamat Jalan Raya Padang – Bukittinggi Km 45 Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Telp/Fax : (0751) 675393 dan Kode Pos 25584.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, paragraf 2 pasal 28 ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas :

**MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

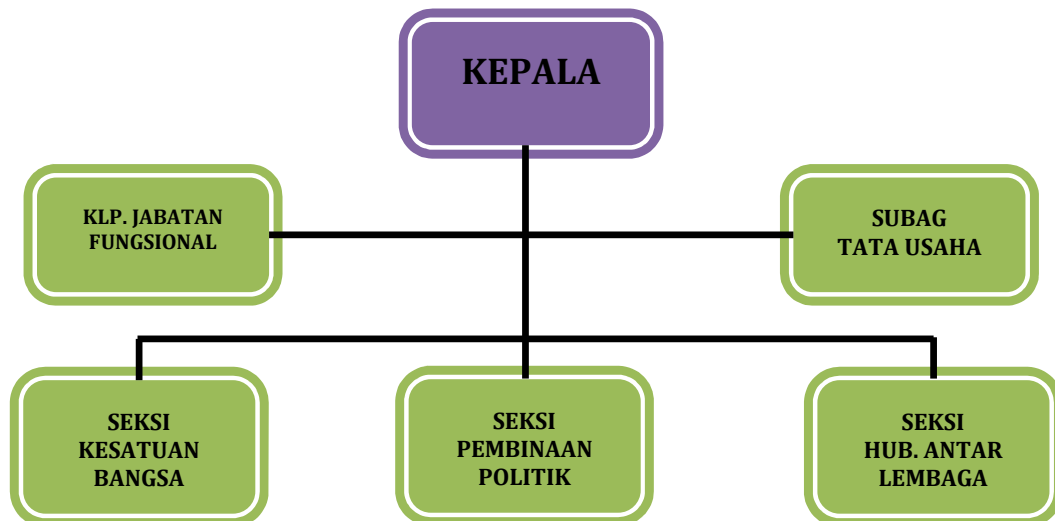
Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

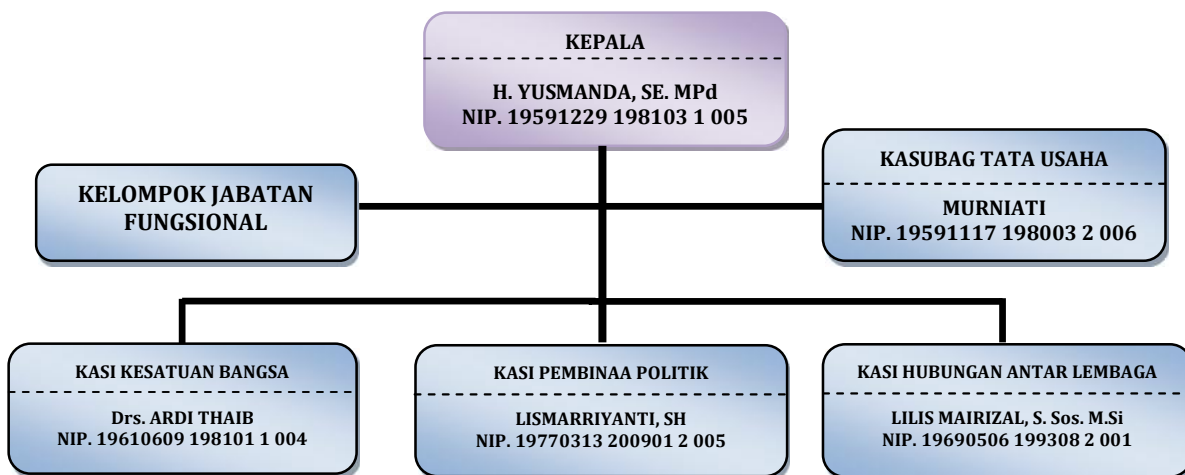
A.1 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar : 1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



PEJABAT STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



A.2 URAIAN TUGAS DAN DASAR HUKUMNYA

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2012, Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

A. KEPALA KANTOR

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.

-
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
 7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
 8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
 9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
 10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

A.3 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI INSTANSI

Pejabat dan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pegawai Struktural yang berjumlah sebanyak 11 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 4 (empat) orang Tenaga Swakelola, dengan rincian nama sebagai berikut :

Tabel. 1

**DAFTAR PEGAWAI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

No.	N A M A	N I P	GOL	ESELON	J A B A T A N	PDDK
1	H. YUSMANDA, SE. M.Pd	19591229 198103 1 005	IV/b	III/a	Kepala Kantor	S.2
2	MURNIATI	19591117 198003 2 006	III/d	IV/a	Kasubag Tata Usaha	SMA
3	Drs. ARDI THAIB	19610609 198101 1 004	III/d	IV/a	Kasi Kesatuan Bangsa	S.1
4	LISMARRIYANTI, SH	19770313 200901 2 005	III/c	IV/a	Kasi Pembinaan Politik	S.2
5	LILIS MAIRIZAL, S. Sos. M.Si	19690506 199308 2 001	IV/a	IV/a	Kasi Hubungan Antar Lembaga	S.1
6	JONI FIRMANSYAH, S. Sos	19630430 198602 1 001	III/d	-	S t a f	S.1
7	JASMADI, S.Sos	19641207 198911 1 002	III/c	-	S t a f	S.1
8	MULYADI	19640201 198403 1 006	III/b	-	S t a f	SMA
9	SRI WAHYUNI, A.Md	19900526 201503 2 002	II/c	-	S t a f	D.III
10	DEFFI MAHDALENA	19811202 200801 2 021	II/b	-	S t a f	SMA
11	AGUSMITA. Z, S.Sos	19860811 201406 2 002	II/a	-	Staf	S.1
12	SYAFRUDDIN	19660701 200604 1 004	I/d	-	S t a f	SD
13	ENNY NOVRITA DEWI, SE	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
14	ERFINA YENTI	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
15	MURNIATI	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMP
16	FAUZAN	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

Identifikasi permasalahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran

-
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
 4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Hambatan Eksternal

1. Aspek kelembagaan :

1. Dengan keluarnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman belum terukur secara jelas.
2. Karena tugas dan fungsi lembaga kesatuan bangsa dan politik tidak terkait secara langsung dengan visi dan misi kepala daerah sehingga kesulitan dalam penganggaran karena tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan.
3. Belum maksimalnya tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Komunitas Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2. Aspek politik :

- Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
- Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis

-
- Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.

3. Aspek Sosial

1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan
3. Kurangnya program pembinaan karakter bangsa
4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya

4. Aspek Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
6. Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan

pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)

5. Aspek Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
3. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
4. Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara

dan HAM.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan perundang-an, perbup	1. Intensitas pembinaan Wasbang 2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang 3. Kompetensi narasumber 4. Koordinasi antar instansi terkait	1. Jurang pemisah antara Masyarakat mampu & tak mampu 2. Munculnya sifat individualis dalam Masyarakat 3. Kehidupan yg makin berat & kompleks 4. Tingkat pendidikan masyarakat	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat	Sedang	Peraturan perundang-	1. Intensitas pembinaan	1. Kondisi politik yg menu-	Masih terjadinya fluktuasi parti-

dlm berpolitik		an, perbup	pada masyarakat dan parpol 2. Sosialisasi peraturan perundangan pada masyarakat & anggota parpol 3. Fasilitasi pada partai politik	runkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik 2. Sikap apatis Masyarakat 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan hak politiknya	sipasi masyarakat dalam politik
Pemahaman ketahanan bangsa dan bela negara Masyarakat	Sedang	Peraturan perundangan, Perbup	1. Koordinasi antar instansi terkait 2. Intensitas pembinaan bela negara 3. Cakupan peserta pembinaan bela negara 4. Kompetensi narasumber	1. Kemajuan teknologi informasi sudah sampai ke daerah 2. Efek globalisasi yang sulit dibendung 3. Tingkat pemahaman Masyarakat 4. Munculnya berbagai ormas / LSM	Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional & bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat
Pemahaman Masyarakat terhadap bahaya narkoba dan miras		Peraturan Perundangan, Perbup	1. Koordinasi antar instansi terkait 2. intensitas penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan 3. Cakupan peserta penyuluhan bahaya narkoba 4. Kompetensi Narasumber	1. Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba 2. sikap apatis masyarakat terhadap peredaran narkoba 3. kemajuan teknologi sehingga timbulnya modus baru dalam peredaran narkoba 4. efek globalisasi yang sulit dibendung	Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Permasalahan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
2. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.
4. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Mengadakan Pembinaan, Penyuluhan dan sosialisasi serta kampanye kepada elemen masyarakat tentang bahaya narkoba

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyajikan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

-
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017. Target-target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman menetapkan visi 2016 - 2021, yaitu :
"Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan, Demokratis Menuju Kabupaten Padang Pariaman yang Aman dan Harmonis" adapun makna dari visi tersebut adalah terwujudnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

dan terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan sejahtera.

2. Misi

Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- ✚ Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.
- ✚ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.
- ✚ Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
- ✚ Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2017

Tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif
		Persentase Laporan pertanggungja	Meningkatnya kesadaran Parpol atas	Persentase Laporan pertanggungja

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	demokratis	waban Parpol tepat waktu	tata kelola keuangan dan administrasi	waban Parpol tepat waktu
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah
Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Jumlah kasus Narkoba	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	Jumlah kasus Narkoba
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
n.	kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural			

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh 4 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/keompok masyarakat	Persentase ormas/keompok yang terdaftar dan aktif	60%
2.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	11 partai politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%
4.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	36 kasus
5.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
	INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/keompok masyarakat	Persentase ormas/keompok yang terdaftar dan aktif	58%	60%	58%	97%
2.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	9 parpol	11 parpol	9 parpol	82%

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2016	Tahun 2017		
				Target	Realisasi	%
3.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%
4.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	54 Kasus	36 Kasus	36 Kasus	100%
5.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2017 :

	Sasaran 1: Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat
---	---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	60%	58%	97%

Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif tahun ini adalah 60% jumlah ormas/lsm yang aktif dan terdaftar dari Jumlah ormas/lsm yang terdata, namun realisasi dari indikator tersebut hanya 58% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indikator yang sama adalah dengan 55% target dan terealisasi 58% dengan capaian 105% lebih besar dari terget yang ditetapkan, maka capaian tahun ini mengalami penurunan sebanyak 7%. Adapun penyebab dari penurunan kinerja tersebut adalah kurangnya Sosialisasi tentang peraturan dan undangan tentang keormasan dan kurangnya kesadaran dan pemahaman dari pengurus ormas/lsm dalam hal fungsi dan partisipasi ormas tersebut dalam pembangunan daerah dan keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.



Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
I	Program Pendidikan Politik Masyarakat	54.914.650	54,684,150	14,479,850	94.88 %
1.	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring, dan Evaluasi Ormas/LSM	24,500,000	24,269,500	230,500	99.6
2.	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	30,414,650	30,414,650	-	100.00

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM

Anggaran **Rp 24.500.000,00** dan realisasi **Rp 24.269.500,00** atau sebesar **99,06%** dengan sisa dana sebesar **Rp 230.500,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terdatanya, terpantaunya Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya pendataan dan pemantauan terhadap ormas dan LSM.

b. Sosialisasi Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013

Anggaran **Rp 30.414.650,00** dan realisasi **Rp 30.414.650,00** atau sebesar **100%**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman Pengurus Ormas dan LSM tentang Sosialisasi Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Sosialisasi Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013.



Sasaran 2:

Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

2. Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	11 parpol	9 parpol	82%

Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu tahun ini adalah 11 (sebelas) Partai Politik yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dibandingkan dari 9 (sembilan) Partai Politik yang menerima bantuan APBD setiap tahun, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 82%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan 11 (sebelas) partai politik target dan terealisasi 9 (sembilan) partai politik dengan capaian 82%.

Adapun penyebab dari tidak tercapainya 100% kinerja tersebut adalah kurangnya pemahaman pengurus partai politik tentang tertib administrasi keuangan partai dan terjadinya pergantian pengurus partai yang mengakibatkan pengurus tersebut belajar lagi tentang administrasi keuangan. Adapun partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan tepat waktu tersebut adalah Partai Hati nurani Rakyat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Berikut partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Tahun 2017 :

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	Jumlah Suara	Nilai Bantuan (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat	5	20,709	90,494,809
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4	19,689	86,037,583
3	Partai Keadilan Sejahtera	4	15,842	69,226,847
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	15,079	65,892,667
5	Partai Golongan Karya	5	28,517	124,614,442
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	4	19,357	84,586,799
7	Partai Demokrat	4	19,847	86,728,016
8	Partai Amanat Nasional	3	14,772	64,551,129
9	Partai Persatuan Pembangunan	3	14,944	65,302,739
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3	12,501	54,627,245
11	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	1	6,144	26,848,236
	JUMLAH	40		818,910,512

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
I	Program Pendidikan Politik Masyarakat	117,990,000	116,897,511	1,092,489	99.07
3.	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	51,840,000	51,666,261	173,739	99.66
4.	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	66,150,000	65,231,250	918,750	98.61

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

c. Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Anggaran **Rp 66.150.000,00** dan realisasi **Rp 65.231.250,00** atau sebesar **98,61%** dengan sisa dana sebesar **Rp 918,750,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pimpinan parpol dan aparatur dalam proses pengajuan dan pertanggungjawaban.





d. Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik

Anggaran **Rp 51.840.000,00** dan realisasi **Rp 51.666.261,00** atau sebesar **99,66%** dengan sisa dana sebesar **Rp173.739,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya Verifikasi terhadap Bantuan Dana Hibah yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik.



Sasaran 3:

Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

3. Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%

Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah tahun ini adalah 100% target yang didapat Jumlah Konflik yang terjadi dibandingkan dengan potensi konflik yang ada. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indikator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh kerjasama tim lintas sektoral yang tergabung dalam komunitas intelijen daerah dan tim penanganan konflik sosial berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dan undang serta faktor lainnya yaitu karakteristik masyarakat Padang Pariaman yang homogen dan berbudaya serta mengedepankan musyawarah mufakat terlebih dahulu dalam penyelesaian suatu masalah sehingga potensi konflik yang terdeteksi sejak dini dapat dicegah.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERS ENTA SE
II	<i>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	<i>268,055,000</i>	<i>255,227,313</i>	<i>12,827,687</i>	<i>95.21</i>

5.	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	38,055,000	35,857,400	2,197,600	94.23
6.	Kegiatan Operasional komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	90,000,000	84,172,250	5,827,750	93.52
7.	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	140,000,000	135,197,663	4,802,337	96.57

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM

Anggaran **Rp 38.055.000,00** dan realisasi **Rp 35.857.400,00** atau sebesar **94,23%** dengan sisa dana sebesar **Rp 2.197.600,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatnya pengetahuan dan Wawasan FKDM di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman.





b. Kegiatan Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantrantibmas di Daerah)

Anggaran **Rp 90.000.000,00** dan realisasi **Rp 84.172.250,00** atau sebesar **93,52%** dengan sisa dana sebesar **Rp 5.827.750,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terpantaunya dan terkendalinya Keamanan dan ketertiban masyarakat di 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun.





c. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten

Anggaran **Rp 140.000.000,00** dan realisasi **Rp 135.197.663,00** atau sebesar **96,57%** dengan sisa dana sebesar **Rp 4.802.337,00**. Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah agar terpantau, tertangani dan tersedianya Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun di 17 (tujuh belas) Kecamatan. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya Dokumen Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman per triwulan.





Sasaran 4:

Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

4. Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	36 Kasus	36 Kasus	100%

Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.



Untuk target pada Indikator Kinerja Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat tahun ini adalah 36 kasus target. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 36 kasus dengan capaian kinerja 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indikator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.



Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh kerjasama Badan Narkotika Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan penyuluhan kepada generasi muda dan mengkampanyekan bahaya anti narkoba setiap tahun melalui kegiatan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional setiap tahun yang dilaksanakan oleh BNK dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari siswa SD, SMP dan SMA, Tokoh masyarakat serta aparaturnya daerah serta kegiatan razia dilakukan ke sekolah-sekolah dalam rangka pemberantasan narkoba di masyarakat.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
II	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit	145,452,400	143,281,450	2,170,950	98.51

	masyarakat (Pekat)				
8.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	40,152,400	40,152,400	-	100.00
9.	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	65,300,000	64,188,550	1,111,450	98.30
10	Operasional BNK	40,000,000	38,940,500	1,059,500	97.35

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Anggaran **Rp 40.152.400,00** dan realisasi **Rp 40.152.400,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatkan kesadaran Generasi Muda akan Bahaya Narkoba dan sejenisnya.

b. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman

Anggaran **Rp 65.300.000,00** dan realisasi **Rp 64.188.550,00** atau sebesar **98,30%** dengan sisa dana sebesar **Rp 1.111.450,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terlaksananya Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman dengan Acara Lomba Gerak Jalan Jantung Sehat.

c. Kegiatan Operasional BNK

Anggaran **Rp 40.000.000,00** dan realisasi **Rp 38.940.500,00** atau sebesar **97,35%** dengan sisa dana sebesar **Rp 1.059.500,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu terlaksananya Kegiatan Penyuluhan dan Razia terhadap SMAN 1 V Koto Kampung Dalam, SMAN 1 Sungai Limau dan SMAN 1 Padang Sago.

Dok. SMA N 1 V Koto Kampung Dalam



Dok. SMA N 1 Padang Sago



Dok. SMA N 1 Sungai Limau



**Sasaran 5:**

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

5. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%

Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam akibat dengan upaya merusak tatanan kehidupan berbangsa tahun ini adalah 100% target yang didapat Jumlah Gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan potensi gangguan keamanan akibat. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indikator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor pendukung tercapainya indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh selain kerjasama tim lintas sektoral yang tergabung dalam komunitas intelijen daerah dan tim penanganan konflik sosial berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dan undang juga dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat dan pembentukan forum pembauran kebangsaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang beranggotakan dari unsur tokoh masyarakat antar etnis, suku dan budaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
II	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	98,864,050	98,671,450	192,600	99.81
11.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	32,513,650	32,513,650	-	100.00
12.	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	30,350,400	30,350,400	-	100.00
13.	Forum Pembauran Kebangsaan	36,000,000	35,807,400	192,600	99.47

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai – nilai Luhur Budaya Bangsa

Anggaran **Rp 32.513.650,00** dan realisasi **Rp 32.513.650,00** atau sebesar **100%**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatnya Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman tentang nilai – nilai luhur bangsa.

b. Kegiatan Pembinaan Wawasan Bangsa

Anggaran **Rp 30.350.400,00** dan realisasi **Rp 30.350.400,00** atau sebesar **100%** Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatnya Wawasan Kebangsaan Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dengan memegang teguh empat pilar kebangsaan.



c. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan

Anggaran **Rp 36.000.000,00** dan realisasi **Rp 35.807.400,00** atau sebesar **99,47%** dengan sisa dana sebesar **Rp 192.600,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu Meningkatnya Wawasan Aparatur Ormas/LSM, Guru SLTA dalam rangka Pembinaan Wawasan Kebangsaan.



3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017.

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%
1	2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36,240,567	36,035,000	205,567	99.43
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26,300,000	11,821,039	14,478,961	44.95
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56,000,000	54,670,000	1,330,000	97.63
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18,000,000	18,000,000	-	100.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,000,000	9,130,000	870,000	91.30
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	23,000,000	14,734,500	8,265,500	64.06
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	95,000,000	93,671,550	1,328,450	98.60
8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	42,000,000	42,000,000	-	100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	14,925,000	75,000	99.50
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	10,000,000	7,701,000	2,299,000	77.01
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	65,000,000	45,003,659	19,996,341	69.24
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	11,000,000	8,585,000	2,415,000	78.05
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20,000,000	19,651,000	349,000	98.26
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
14	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000	21,006,400	3,993,600	84.03
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				
15	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Pembekalan FKDM	38,055,000	35,857,400	2,197,600	94.23
16	Kegiatan Operasional komunitas Intelijen Daerah (Peningkatan Penanganan Kantramtibmas di Daerah)	90,000,000	84,172,250	5,827,750	93.52
17	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	140,000,000	135,197,663	4,802,337	96.57
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				
18	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	32,513,650	32,513,650	-	100.00
19	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	30,350,400	30,350,400	-	100.00
20	Forum Pembauran Kebangsaan	36,000,000	35,807,400	192,600	99.47
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)				
21	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	40,152,400	40,152,400	-	100.00
22	Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman	65,300,000	64,188,550	1,111,450	98.30
23	Operasional BNK	40,000,000	38,940,500	1,059,500	97.35
	Program Pendidikan Politik masyarakat				
24	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	51,840,000	51,666,261	173,739	99.66
25	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	66,150,000	65,231,250	918,750	98.61
26	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring, dan Evaluasi Ormas/LSM	24,500,000	24,269,500	230,500	99.06
27	Dialog Politik Bersama Pimpinan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat	36,130,000	35,130,600	999,400	97.23
28	Sosialisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013	30,414,650	30,414,650	-	100.00
	JUMLAH	1,173,946,667	1,100,826,622	73,120,045	93.77

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2017 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2017 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

4.2 LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Merancang sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur untuk meningkatkan kinerja.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahnya dalam segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, April 2018
KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

HASAN BASRI, S.Sos
NIP. 19640915 198903 1 013